

EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)

Tata Bangun Pramesti¹, Elva Nuraina², Nur Wahyuning Sulistyowati^{3*}

^{1,2,3}Universitas PGRI Madiun, Indonesia

¹pramestitata89@gmail.com, ²elvanuraina@unipma.ac.id, ³nurwahyu@unipma.ac.id

Received: 10-12-2023

Revised: 14-12-2023

Approved: 20-12-2023

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini mengevaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa melalui siskeudes berlandaskan Permendagri No 20 Tahun 2018 pada 10 desa di Kec. Wonoasri Kab. Madiun dengan jenis penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi, sumber data primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian yaitu implementasi siskeudes sebagai sistem pengelolaan keuangan di 10 desa Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun tahapannya telah berhasil dilaksanakan sesuai permendagri No 20 Tahun 2018 dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. Penggunaan siskeudes sebagai sistem pengelolaan keuangan sangat membantu tugas perangkat desa dan mempercepat proses kerja pengelolaan keuangan. Namun demikian, masih terdapat kekurangan dari siskeudes yaitu masih terjadi error pada sistem, jaringan internet masih lemah, beberapa desa masih ada yang kesulitan dalam pengoperasian siskeudes saat ada kendala pada sistem.

Kata kunci: *Pengelolaan Keuangan Daerah.*

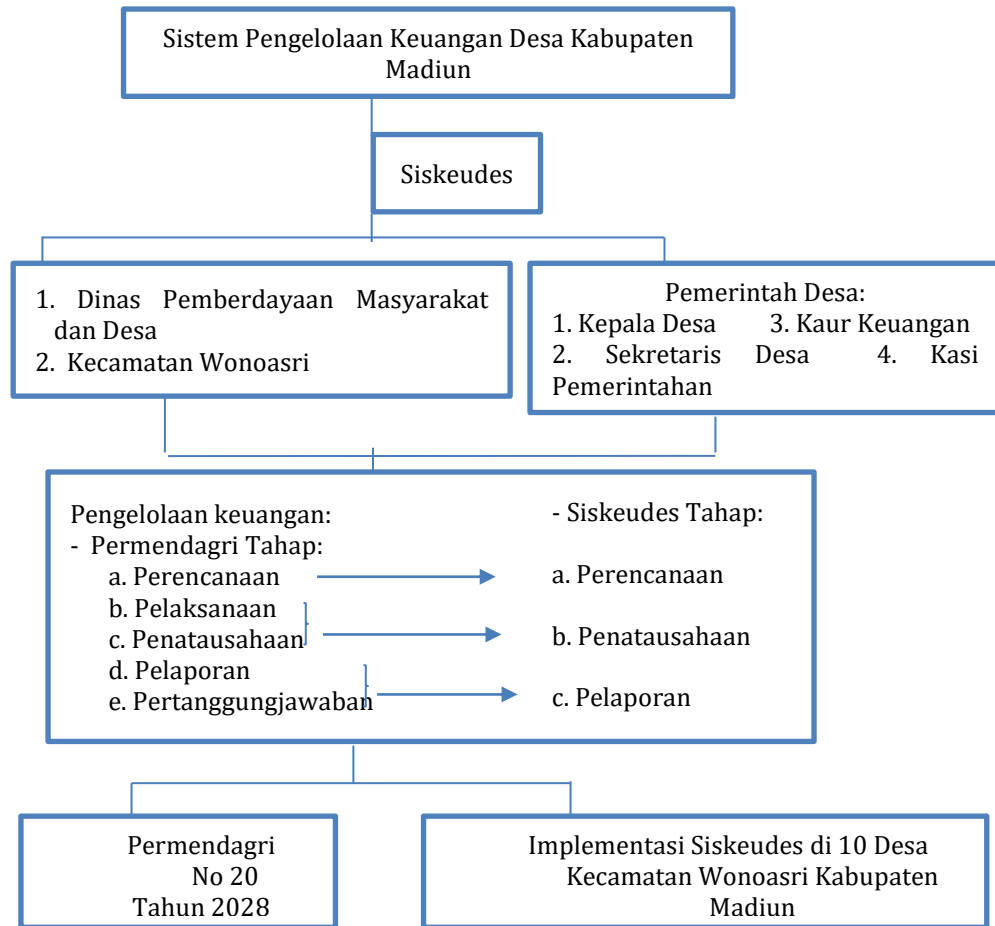
PENDAHULUAN

Pemerintah memberi kesempatan desa mengatur tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan desa tercantum pada UU No. 6 Tahun 2014 (Indonesia, 2014). Pemerintah memberi hak sepenuhnya kepada desa dalam mengelola pembangunan desanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam hal ekonomi, sumber daya alam, maupun kualitas hidup masyarakatnya. Pengelolaan berawal dari perencanaan diakhiri pertanggungjawaban dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Pengelolaan keuangan desa ialah seluruh aktivitas mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa secara tertib dan disiplin anggaran, serta sistematis yang mengacu pada Permendagri No 20 Tahun 2018 (Kumolo, 2018). Selain laporan keuangan yang bersifat akuntabilitas, transparan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, pemerintah desa juga memerlukan sarana prasarana yang mendukung untuk mewujudkan pembangunan desa, salah satunya dengan mengembangkan sistem informasi pemerintah desa. Sistem informasi desa harus dapat mengakses segala hal yang merupakan informasi dari desa tersebut yaitu (data desa, pembangunan kawasan pedesaan, pembangunan desa lainnya).

Peningkatan pembangunan desa dan kemudahan pengelolaan keuangan desa dilakukan pemerintah Kabupaten Madiun dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi Siskeudes yang merupakan rintisan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yaitu inovasi yang sudah dipersiapkan sejak awal penerapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, sebelum dirubah ke UU No 20 Tahun 2018 tentang desa. Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan *launching* pada 29 November 2017 dan mewajibkan semua desa mengimplementasikan aplikasi Siskeudes dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan desa secara *online* bukan *offline* yang digunakan pada tahun 2016. Evaluasi tetap dilakukan saat implementasi Siskeudes yang bertujuan untuk penyempurnaan. Pemerintah desa harus siap untuk menerapkan peraturan baru yang berlaku agar dapat membawa manfaat untuk meningkatkan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat (Wijayandanu 2020). Namun demikian,

implementasi sebaik apapun rencana yang telah disusun tetap akan sia-sia apabila rencana tersebut tidak dijalankan sebaik mungkin (Riani dkk, 2019). Sebagaimana ungkapan Atintyasputri dan Hapsari (2019) bahwa pengelolaan dana desa Banyuwangi, Boyolali melalui siskeudes sudah terimplementasi baik. Namun, pada proses penginputan pada laporan pertanggungjawaban tidak menggunakan siskeudes. Sedangkan Sulistyowati dkk, (2019) menemukan bahwa implementasi siskeudes Desa Besuki Situbondo cukup baik, namun pertanggungjawabannya belum dipublikasikan kepada masyarakat. Minimnya pengetahuan, kemampuan teknologi Informasi dan komputer menjadi sebab kurang efektifnya kinerja aparatur dalam pengoperasian siskeudes (Wibowo, Triyanto, dan Sutojo, 2020); (Puspasari dan Purnama, 2018). Bimbingan Teknis kepada seluruh operator dan OPD siskeudes online, komitmen Pemerintah Kab. Pati sebagai pengemban fungsi asistensi kepada desa dalam menunjang implementasi siskeudes, integritas Pemerintah Daerah bersama OPD dan instansi terkait secara birokratis terstruktur dengan baik (Wijayandanu dan Astuti, 2020). Dan kurangnya pemahaman SDM terhadap peraturan yang ada (Mamuaya, Sabijono, dan Gamaliel, 2017). Artinya, implementasi siskeudes dapat dikatakan sudah terlaksana dengan baik ketika terlaksana secara sistematis dengan SDM yang mumpuni sesuai tahapan dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sehingga siskeudes berjalan efektif.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih terdapat masalah terkait pengelolaan keuangan daerah terutama adanya keterlambatan dalam penginputan data dan kurangnya kelengkapan administrasi saat pelaporan, padahal tujuan diberlakukannya siskeudes adalah untuk memudahkan pengelolaan keuangan, namun jika masih terdapat masalah dalam pelaporan keuangan maka penting untuk ditanyakan apakah siskeudes benar-benar memudahkan pengelolaan keuangan desa oleh para perangkat desa di seluruh desa Kec. Wonoasri Kab. Madiun Provinsi Jawa Timur-Indonesia, karena menurut keterangan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, masih terdapat beberapa desa yang kurang tertib dalam penginputan data dan kelengkapan administrasi laporan keuangan. Beberapa uraian di atas menjadi dasar peneliti melakukan penelitian evaluasi implementasi siskeudes yang bertujuan mengevaluasi implementasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 melalui Siskeudes pada 10 desa di Kec. Wonoasri Kab. Madiun dalam peningkatan kinerja perangkat desa dan kualitas laporan keuangan desa yang semakin baik dengan kerangka konseptual yang tergambar pada Gambar 1 berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan evaluasi proses sehingga tergolong jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif merupakan metode paling cocok untuk meneliti suatu proses dalam kegiatan pelaksanaan suatu rencana program (Sugiyono, 2018). Peneliti menggunakan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dari 4 informan sebagai pengguna dan penanggung jawab pelaporan keuangan desa dengan menggunakan siskeudes diantaranya Kepala Desa, Sekdes, Kaur Keuangan, dan Kasi Pemerintahan Desa di 10 Desa Kec. Wonoasri Kab. Madiun. Peneliti mengumpulkan data melalui beberapa metode berikut ini:

1. Observasi

Observasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang terdapat pengawas pengelolaan keuangan desa melalui siskeudes. Pada proses ini, peneliti melakukan pengamatan dan mempelajari pengelolaan keuangan dengan menggunakan siskeudes melalui modul siskeudes dan mempelajari Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara pra penelitian kepada pengawas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai pengelolaan keuangan di Kec. Wonoasri untuk mengetahui permasalahan desa selama penggunaan siskeudes. Selanjutnya wawancara ditujukan kepada Kepala Desa, Sekdes, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan Desa di 10 Desa Kec. Wonoasri Kab. Madiun melalui pedoman wawancara pada Tabel 1. berikut:

Tabel 1. Pedoman Wawancara

Tahap	No.	Pertanyaan
Perencanaan	1.	Bagaimana langkah-langkah prosedur pada perencanaan pengelolaan keuangan desa?
	2.	Apa saja data atau informasi yang harus diinput ke dalam siskeudes selama tahap perencanaan?
	3.	Apa saja tugas Anda selama perencanaan pengelolaan keuangan desa?
Pelaksanaan	1.	Bagaimana langkah-langkah prosedur pada pelaksanaan pengelolaan keuangan desa?
	2.	Apa saja data atau informasi yang harus diinput ke dalam siskeudes selama tahap pelaksanaan?
	3.	Apa saja tugas Anda selama tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa?
Penatausahaan	1.	Bagaimana langkah-langkah prosedur pada penatausahaan pengelolaan keuangan desa?
	2.	Apa saja data atau informasi yang harus diinput ke dalam siskeudes selama tahap penatausahaan?
	3.	Apa saja tugas Anda selama tahap penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa?
Pelaporan	1.	Bagaimana langkah-langkah prosedur pada pelaporan pengelolaan keuangan desa?
	2.	Apa saja data atau informasi yang harus diinput ke dalam siskeudes selama tahap pelaporan?
	3.	Apa saja tugas Anda selama tahap pelaporan dalam pengelolaan keuangan desa?
Pertanggungjawaban	1.	Bagaimana langkah-langkah prosedur pada pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa?
	2.	Apa saja data atau informasi yang harus diinput ke dalam siskeudes selama tahap pertanggungjawaban?
	3.	Apa saja tugas Anda selama tahap pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa?
Penerapan Siskeudes	1.	Apa yang dilakukan pemerintah kabupaten dan kecamatan sebagai bentuk pendampingan dan pembinaan untuk kelancaran penggunaan siskeudes?
	2.	Apakah sudah cukup efektif dan efisien pemakaian siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa? Sertakan alasannya!
	3.	Apakah semua kelengkapan administrasi (nota, kuitansi, dll) dalam pengelolaan keuangan desa sudah bisa diinput melalui siskeudes? atau masih ada kelengkapan administrasi yang masih manual? Jika ada, seperti apa contohnya?
	4.	Bagaimana kelebihan dan kekurangan aplikasi Siskeudes sebagai sistem pengelolaan keuangan desa?
	5.	Apasaja hambatan dalam implementasi Siskeudes?
	6.	Apa yang dapat dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi hambatan (No. 5) dalam implementasi

Tahap	No.	Pertanyaan
		Siskeudes?
	7.	Apa dampak yang dirasakan pegawai pada penerapan siskeudes sebagai sistem pengelolaan keuangan?

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang mendukung dalam penelitian ini meliputi laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang diteliti.

Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi, triangulasi, penyajian, kesimpulan. Reduksi data merupakan menyimpulkan data yang telah dikumpulkan dan mengatur data dalam susunan konsep tertentu (Rijali, 2019). Pertama, peneliti mereduksi data yang dianggap tidak diperlukan, tidak berkaitan dengan tujuan penelitian. Kedua, peneliti memeriksa keaslian data dan informasi dari triangulasi dengan memberikan kesimpulan terkait pengelolaan desa dari informan 10 Desa Kec. Wonoasri melalui pertanyaan yang sama. Ketiga, perolehan informasi dan data yang valid, dilanjutkan menyajikan data. Keempat, peneliti menyimpulkan hasil penelitian berdasarkan hasil temuan penelitian dari wawancara, observasi, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Siskeudes

Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa implementasi pengelolaan keuangan daerah menggunakan siskeudes di Kecamatan Wonoasri Kabupaten Madiun telah terlaksana dengan baik yaitu telah dapat mengimplementasikan pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

a. Perencanaan

Perencanaan diawali dengan penyusunan APBDes yang dikoordinasi oleh sekdes dipimpin kepala desa dibahas dan disepakati bersama saat musyawarah. Hasil musyawarah disusun rancangan peraturan desa tentang APBDes oleh sekdes yang disetujui kepala desa dan disampaikan kepada bupati maupun masyarakat.

b. Penatausahaan

Pada tahap ini kaur keuangan dan kasi menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang terdiri dari Rencana Aktivitas dan Anggaran Desa, Rencana Kerja Aktivitas Desa, dan Rencana Anggaran Biaya. Pencatatan ini dilakukan melalui siskeudes pada menu tahapan penatausahaan. Kemudian sekdes melakukan verifikasi DPA yang disetujui kepala desa. Kaur keuangan menyusun SPP untuk diajukan pencairan dana anggaran. Kaur keuangan dan kasi desa wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kepada kepala desa. Atas dasar aktivitas yang dilaksanakan, kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum dan membuat buku pembantu kas umum yaitu buku pembantu (bank, pajak, panjar) yang pencatatannya memakai siskeudes pada menu tahapan penatausahaan. Setiap akhir bulan, buku kas umum harus ditutup dan sekdes memverifikasi, mengevaluasi, menganalisis laporan pada buku kas umum yang disampaikan dan disetujui kepala desa.

c. Pelaporan

Pada tahap ini kaur keuangan menyusun laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi aktivitas semester pertama dan sekdes sebagai koordinator laporan realisasi tersebut. Pelaporan tersusun otomatis melalui siskeudes pada

tahap pelaporan dari data terinput di tahap sebelumnya. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDes dan laporan realisasi kegiatan kepada bupati pada semester pertama. Hingga pada akhir tahun, kaur keuangan menyusun laporan pertanggungjawaban APBDDes selama satu tahun yang disampaikan kepada bupati oleh kepala desa sebagai bentuk pertanggungjawaban dan diinformasikan kepada masyarakat.

Seluruh tahapan pengelolaan keuangan di Kec. Wonoasri telah dilakukan berdasar regulasi Permendagri No 20 Tahun 2018 sesuai teori *stewardship* dan *stakeholder* bahwa seluruh desa di Kec. Wonoasri dapat menunjukkan eksistensi PEMDA sebagai lembaga yang dapat dipercaya melaksanakan tugas dan fungsi dengan tepat, bertanggungjawab atas apapun yang ditugaskan, termasuk keuangan, berbuat sesuai kepentingan publik, dengan demikian tujuan ekonomi, pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dicapai dengan optimal. Artinya, praktik penggunaan siskeudes dalam pengelolaan keuangan daerah Kec. Wonoasri Kab. Madiun telah berhasil dilakukan seperti halnya ungkapan (Radha Norliani, Ahmat Harahap, 2020) dan sudah berjalan efektif sebagaimana yang diungkapkan (Gayatri and Latrini, 2018); (Deliyanti, Manne, dan Fajarina Laming, 2020).

Pelaksanaan di lapangan, seluruh perangkat desa telah menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik sesuai langkah-langkah Permendagri No 20 Tahun 2018 dengan 3 tahapan siskeudes (penganggaran, penatausahaan, pelaporan) yang mempermudah pengelolaan keuangan, di mana pelaksanaan dan penatausahaan disatukan dengan penatausahaan di siskeudes, sedangkan pelaporan dan pertanggungjawaban disatukan pada tahap pelaporan di siskeudes. Hasil informasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Madiun masih terdapat keterlambatan pelaporan, dikarenakan banyak tugas yang harus dilakukan secara mendadak oleh perangkat desa, terutama saat pandemi covid-19; beberapa diantara perangkat desa harus merangkap peran dan tugas. Seperti Desa Sidomulyo, yang tidak memiliki kepala desa sehingga tugas dan kewajiban kepala desa ditangani sekdes. Apabila terdapat perangkat desa yang sakit/berhalangan bertugas harus digantikan tugasnya dan biasanya yang menggantikan sekdes di mana sebagai koordinator setiap kegiatan desa. Oleh sebab itu, banyak kewajiban yang terlambat dilakukan salah satunya penginputan data siskeudes terutama bagi desa yang tidak menggunakan operator untuk membantu penginputan.

B. Dampak Penggunaan Siskeudes

Siskeudes telah banyak membantu mempercepat proses kerja pengelolaan keuangan, di mana secara otomatis pelaporan dapat dilakukan sesuai dengan data-data yang telah diinput sebelumnya. Laporan keuangan dapat lebih cepat tersusun, data yang diinput aman, terperinci, dan terprogram dengan baik. Siskeudes disusun sesuai langkah-langkah pengelolaan keuangan Permendagri No 20 Tahun 2018, sehingga perosesnya sesuai regulasi yang berlaku sejalan dengan Maharani dan Akbar (2020); Malahika, Karamoy, dan Pusung (2018) juga mengemukakan bahwa siskeudes berperan penting pada pemerintahan, pegawai desa untuk membantu pekerjaan pegawai.

Kekurangan siskeudes yaitu membutuhkan jaringan yang cukup kuat untuk mengoperasikan, jika tidak maka penginputan data tidak akan berhasil sehingga membutuhkan sarana prasarana yang cukup memadai, selain itu meskipun jaringan sudah baik namun masih sering terjadi kemacetan sistem karena banyaknya akun yang menggunakan siskeudes, di mana ada 198 desa di seluruh Kab. Madiun yang menggunakan siskeudes. Kerumitan pengoperasian siskeudes juga menghambat proses pelaporan pada desa yang memiliki SDM yang kurang

memumpuni, dalam hal ini beberapa desa memperkerjakan pegawai baru yang biasanya lebih muda dan “melek” teknologi sebagai operator siskeudes untuk membantu kaur keuangan dan sekdes melakukan penginputan data. Pemerintah Kec. Wonoasri dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Madiun melakukan pembinaan siskeudes di setiap awal tahun untuk mengedukasi perangkat desa yang bertugas mengelola keuangan desa dengan siskeudes, selain pembinaan juga dilakukan pendampingan pada setiap desa dalam implementasi siskeudes, sehingga jika sewaktu-waktu terjadi *error* pada sistem operator desa dapat langsung melaporkan dan meminta bantuan. Sehingga sistem dapat kembali berjalan dengan normal dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menjadi tidak terhambat. Artinya, penggunaan siskeudes dalam pengelolaan keuangan daerah Kec. Wonoasri Kab. Madiun sudah berhasil meskipun masih terdapat kendala dalam penggunaannya karena jaringan internet yang belum kuat, sumber daya manusia yang kurang melek IT sehingga belum berjalan dengan baik dan efisien, karena masih perlu dukungan-dukungan lain supaya terimplementasi dengan baik dan efisien selaras dengan (Riani, Kalalinggi, and Anggraeiny, 2019).

KESIMPULAN

Implementasi siskeudes sebagai aplikasi pengelolaan keuangan daerah di 10 Desa Kec. Wonoasri Kab. Madiun sudah dilaksanakan dengan baik. Seluruh tahapannya dilakukan sesuai regulasi yang berlaku yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018 melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban di menu siskeudes meluipi (perencanaan, penatausahaan, pelaporan) yang keseluruhan tahapannya dilaksanakan dengan baik. Implementasi pengelolaan keuangan menggunakan aplikasi siskeudes di 10 desa Kec. Wonoasri tidak memiliki masalah yang berarti dalam pengoperasiannya. Siskeudes banyak membantu mempercepat proses kerja pengelolaan keuangan di seluruh desa Kec. Wonoasri, di mana pelaporan secara otomatis dapat dilakukan sesuai data-data yang terinput sebelumnya. Namun dalam praktiknya, masih terdapat keluhan desa terkait siskeudes yaitu membutuhkan jaringan yang cukup kuat untuk mengoperasikan dalam keberhasilan input data. Terjadinya kemacetan aplikasi saat digunakan bersamaan di seluruh desa Kab. Madiun dan kondisi SDM yang kurang memumpuni merasa siskeudes sedikit rumit dioperasikan di beberapa desa Kec. Wonoasri. Keterbatasan penelitian ini masih melihat dari aspek kesesuaian sistem dan regulasi, belum melihat dari aspek sumber daya manusia dan faktor lain yang mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan penggunaan siskeudes sebagai aplikasi pengelolaan keuangan desa di Kec. Wonoasri Kab. Madiun, Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Atintyasputri, Angela Ayu Wilma, dan Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari. (2019). Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuwang. *Perspektif Akuntansi*. 2(2): 169–93.
- Deliyanti, A Indah, Arifuddin Manne, and Ripa Fajarina Laming. (2020). Desa Poleonro Kecamatan Libureng Kabupaten Bone. 6(004): 225–33.
- Gayatri, Gayatri, and Made Yenni Latrini. (2018). Efektivitas Penerapan Siskeudes Dan Kualitas Laporan Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*. 113. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/39954>.
- Indonesia, Presiden Republik. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>.

- Kumolo, Tjahjo. (2018). *Berita Negara Republik Indonesia. Www.Peraturan.Go.Id.* Vol. 611. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri_No.20_TH_2018+Lampiran.pdf).
- Maharani, Dinda Novyasaki, dan Fajar Syaiful Akbar. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal.* 3(1): 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>.
- Malahika, Jehan M., Herman Karamoy, dan Rudy J. Pusung. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi.* 14(1): 578–83. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018>.
- Mamuaya, Jeacklin Valenia, Harijanto Sabijono, dan Hendrik Gamaliel. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Akuntansi.* 5(2): 1020–30. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/16060>.
- Puspasari, Oktaviani Rita, dan Dendi Purnama. (2018). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Kabupaten Kuningan. *Jurnal Kajian Akuntansi.* 2(2): 145–59.
- Radha Norliani, Ahmat Harahap, Eddy Suryani. (2020). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong. *JAPB: Jurnal Administrasi Publik.* 3(2): 503–19.
- Riani, Fani, Rita Kalalinggi, dan Rosa Anggraeny. (2019). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Pemerintahan Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Pemerintahan Integratif.* 7(4): 448–57.
- Rijali, Ahmad. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah.* 17(33): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi.* Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyowati, Norita Citra Y, dan Elok Fitriyah. (2019). Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. *International Journal of Social Science and Business.* 3(3): 299–305.
- Wibowo, Hadiat Trihutomo, Deni Triyanto, dan Adi Sutojo. (2020). Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) 2.0 Di Desa Guru Agung 1 Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur. *JSPG: Journal of Social Politics and Governance* 2 (2): 152–65.
- Wijayandanu, Kresna Aru. (2020). Evaluasi Implementasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Online Di Kabupaten Pati Pada Tahun 2018-2020. *Journal of Politic and Government Studies.* 9(4): 399–410.